

TA 2022



# Draf Rencana Kerja

Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

## Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah subhanahuwata'ala, atas tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Dokumen Renja 2022 ini memuat rencana tahunan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2022, yang diturunkan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup 2022 – 2026.

Selain berdasarkan kepada dokumen Renstra, dokumen Renja ini juga memperhatikan masukan dan sasaran dari berbagai stakeholder dan juga mempertimbangkan kondisi aktual/terkini dari beberapa isu lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian untuk segera ditangani melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Kami menyadari bahwa di tengah keterbatasan berbagai sumber daya, penyusunan program dan kegiatan yang ada di dalam dokumen Renja ini belum akan sanggup menjawab semua permasalahan lingkungan hidup, ataupun menjadi jawaban atas berbagai kewajiban pelaksanaan pengawasan/pembinaan rutin yang seharusnya kami emban. Namun sungguh pun demikian, sambil tetap menyerap dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan proses perencanaan kami kedepan, program dan kegiatan yang telah kami rencanakan untuk dilaksanakan di tahun 2022 sebagaimana dijabarkan di dalam dokumen ini akan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel.

Demikian pengantar dokumen ini kami sampaikan, semoga perencanaan tahunan dalam dokumen Renja DLH TA 2022 ini di ridhai Allah dan dimudahkan pelaksanaannya sehingga dapat menjadi jawaban atas permasalahan lingkungan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 2021  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Sumatera Barat



Ir. Siti Aisyah, M.Si.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	2
	1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	4
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	4
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
	3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	26
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	27
	3.3 Program dan Kegiatan	28
BAB VIII	PENUTUP	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pagu dan Realisasi Tahun 2018	4
Tabel 2.2	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2019 dinas lingkungan hidup provinsi sumatera barat	5
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	13
Tabel 2.4	Review terhadap rancangan awal rkpd tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat	16
Tabel 3.1	Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2020	30
Tabel 3.2	Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020	32

# Bab I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan hidup Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup yang disiapkan satu tahun sebelumnya adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansi menterjemahkan arah kebijakan dan strategi SKPD 5 tahunan yang telah dirumuskan di dalam dokumen Renstra menjadi perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan dengan tetap mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja SKPD adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 14) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas LH adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja, serta untuk mencapai harmonisasi perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### 1. Bab I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

#### 2. Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- c. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- e. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

#### 3. Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- a. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- b. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

#### 4. Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 5. Bab V PENUTUP

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam mengevaluasi pelaksanaan seluruh program Lingkungan Hidup, dapat dilihat melalui tercapainya indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dan memberikan gambaran peranan lingkungan hidup terhadap prioritas pembangunan daerah, sehingga upaya untuk mendorong keterkaitan antara program terus dilaksanakan, dimana keberhasilan satu program akan meningkatkan keberhasilan program lainnya, dan sebaliknya kegagalan salah satu program juga akan menurunkan capaian keberhasilan program lainnya. Dengan demikian sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup.

Alokasi anggaran belanja langsung yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp.7.993.049.326,- yang terdiri dari 11 program 50 kegiatan. Sedangkan Alokasi Anggaran 2021 yang diterima Dinas Lingkungan Hidup menurut DPA 2021 adalah sebesar Rp. 12.344.029.000,- yang terdiri dari 9 Program 15 kegiatan 35 sub kegiatan.

Rincian realisasi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi 2020

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	8.525.425.782	8.389.277.702
2	Belanja Langsung (BL)		
	a. BL Pokok/Rutin	2.861.952.152	2.817.847.066
	b. BL Kegiatan	5.131.097.174	4.832.858.570
	TOTAL	7.993.049.326	7.650.705.636

Pada tahun 2020 dari 11 program dan 50 kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH terdapat 2 (dua) kegiatan yang melebihi target dan 1 (satu) kegiatan yang tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut:



Kegiatan yang melebihi target

1. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan LH dengan target 2 objek terealisasi 4 objek.
2. Pembinaan Hukum dan Perizinan Lingkungan dengan target 3 usaha dan/atau kegiatan terealisasi 10 usaha dan/atau kegiatan.

Kegiatan yang tidak mencapai target

1. Kegiatan Penyusunan dokumen lingkungan TPA Regional Payakumbuh dengan target 1 dokumen terealisasi 0 dokumen. Rendahnya realisasi pada kegiatan ini disebabkan belum selesainya penyusunan dokumen lingkungan akibat adanya beberapa kendala. Finalisasi dari penyusunan dokumen lingkungan ini akan dianggarkan kembali pada anggaran perubahan tahun 2021.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 terdapat adanya perbedaan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan tahun 2020, sehingga tidak dapat benar-benar disandingkan capaian program dan kegiatannya. Perbedaan ini disebabkan karena pada tahun 2021 terjadi perubahan pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Dengan terjadinya perubahan nomenklatur program dan kegiatan maka dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 tidak dapat disandingkan sebagaimana disajikan dalam tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017).

Tabel. 2.2  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2020  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah tahun 2017-2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2017 (tahun n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Tahun berjalan (2021)			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (tahun berjalan /tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)			(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)
			NON URUSAN											
	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	600,00	%	140,00	%	100,00	%	90,00	%	90,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	60,00	bulan	36,00	bulan	12,00	bulan	12,00	bulan	100,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet	60,00	bulan	36,00	bulan	12,00	bulan	12,00	bulan	100,00			
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan yang dialokasikan premi asuransinya	1,00	unit bangunan	1,00	unit bangunan	2,00	unit bangunan	2,00	unit bangunan	100,00			
			21,00	kendaraan roda empat	9,00	kendaraan roda empat	10,00	kendaraan roda empat	10,00	kendaraan roda empat	100,00			
			0,00	traktor	0,00	traktor	1,00	traktor	0,00	traktor	0,00			
	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenagapengaman dan sopir kantor	156,00	Bulan (14 orang tenaga pengaman; 9 orang tenaga sopir; 5 orang tenaga tenaga kebersihan)	51,00	Bulan (14 orang tenaga pengaman; 9 orang tenaga sopir; 5 orang tenaga tenaga kebersihan)	12,00	Bulan (14 orang tenaga pengaman; 9 orang tenaga sopir; 5 orang tenaga kebersihan)	12,00	Bulan (14 orang tenaga pengaman; 9 orang tenaga sopir; 5 orang tenaga kebersihan)	100,00			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60,00	bulan	36,00	bulan	12,00	bulan	12,00	bulan	100,00			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60,00	bulan	36,00	bulan	12,00	bulan	12,00	bulan	100,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan	43,00	komponen	32,00	komponen	9,00	komponen	12,00	komponen	133,33			
				bulan		bulan	12,00	bulan	3,00	bulan	25,00			
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media/surat kabar harian yang disediakan	60,00	bulan	36,00	bulan	12,00	bulan	9,00	bulan	75,00			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	60,00	bulan	36,00	bulan	12,00	bulan	12,00	bulan	100,00			



				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	400,00	%	325,00	%	100,00	%	82,00	%	82,00			
					Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	400,00	%	325,00	%	100,00	%	85,00	%	85,00			
					Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD	400,00	%	325,00	%	100,00	%	75,00	%	75,00			
					Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD	400,00	%	325,00	%	100,00	%	35,00	%	35,00			
					Nilai LAKIP SKPD (minimal BB) [ AA (>90-100); A (>80-90); BB (>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]	280,00	Skor	177,50	Skor	70,00	Skor	80,00	Skor	114,29			
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kerja DLH	32,00	dokumen	28,00	dokumen	3,00	dokumen	8,00	dokumen	266,67			
				Penatausahaan Keuangan SKPD	Tertibnya administrasi keuangan SKPD	60,00	bulan	36,00	bulan	12,00	bulan	12,00	bulan	100,00			
				Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran DLH; Jumlah peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup		peserta rakor		peserta rakor	75,00	peserta rakor	0,00	peserta rakor	0,00			
						44,00	dokumen	35,00	dokumen	9,00	dokumen	9,00	dokumen	100,00			
				Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	0,00	orang	0,00	orang	0,00	orang	0,00	orang				
						0,00	Kab/Kota	0,00	Kab/Kota	0,00	Kab/Kota	0,00	Kab/Kota	#DIV/0!			
				Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Pembayaran Honor pengawasan dan pengendalian aset SKPD	52,00	bulan	36,00	bulan	12,00	bulan	12,00	bulan	100,00			
				<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>													
				<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>													
				Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	IKLH	285,69	indeks	232,11	indeks	71,54	indeks	80,00	indeks	111,83			
				Pengembangan UPTD Laboratorium	Tertibnya pengembangan UPTD Laboratorium	0,00	UPTD	0,00	UPTD	1,00	UPTD	1,00	UPTD	100,00			
				Kerjasama Sister Province Untuk Penerapan Teknologi dan Manajemen Pengelolaan Sampah	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan pengelolaan sampah		orang		orang	4,00	orang	0,00	orang	0,00			
							TPA		TPA	2,00	TPA	0,00	TPA	0,00			
							lokasi		lokasi	2,00	lokasi	0,00	lokasi	0,00			
				Penanggulangan dan pemulihan kerusakan LH	Jumlah dokumen kajian pemetaan sosial pilot project rencana pemulihan Lahan Akses Terbuka yang disusun	0,00	dokumen	0,00	dokumen	0,00	dokumen	0,00	dokumen				
				Pemantauan kualitas lahan dan biota Laut	Jumlah mangrove dan objek gambut yang dipantau	26,00	objek gambut	7,00	objek gambut	0,00	objek gambut	0,00	objek gambut				
						12,00	objek mangrove	6,00	objek mangrove	0,00	objek mangrove	0,00	objek mangrove				
				Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha Dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)	Dukungan objek kegiatan yang dinilai peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	107,00	objek kriteria daerah	84,00	objek kriteria daerah	17,00	objek kriteria daerah	0,00	objek kriteria daerah	0,00			
							laporan		laporan	1,00	laporan	1,00	laporan	100,00			

				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah instansi lingkungan hidup kab/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan; Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3; jumlah dokumen AMDAL fasilitas pengelolaan LB3 yang disusun		kab/kota		kab/kota	19,00	kab/kota	19,00	kab/kota	100,00			
						169,00	dokumen		dokumen	1,00	dokumen	1,00	dokumen	100,00			
							objek	127,00	objek	15,00	objek	21,00	objek	140,00			
				Pengawasan dan Pengendalian sumber kerusakan LH	Dukungan pengumpulan data jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi kerusakannya dan ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan		laporan		laporan	1,00	laporan	1,00	laporan	100,00			
						105,00	objek	52,00	objek	25,00	objek	0,00	objek	0,00			
				Pembinaan Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim (Kampung Iklim)	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	0,00	orang	0,00	orang	60,00	orang	0,00	orang	0,00			
						84,00	kab/kota	41,00	kab/kota	10,00	kab/kota	8,00	kab/kota	80,00			
				Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)	Jumlah kab/kota yang dibina dan dinilai; Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	105,00	orang	105,00	orang	0,00	orang	0,00	orang				
						73,00	kab/kota;	41,00	kab/kota;	0,00	kab/kota;	0,00	kab/kota;				
				Pengadaan peralatan, Supporting Laboratorium dan Bahan Kimia	Jumlah pengadaan peralatan, supporting laboratorium dan bahan kimia yang disediakan		unit peralatan uji dan pendukung laboratorium serta bahan kimia		unit peralatan uji dan pendukung laboratorium serta bahan kimia	23,00	unit peralatan uji dan pendukung laboratorium serta bahan kimia	15,00	unit peralatan uji dan pendukung laboratorium serta bahan kimia	65,22			
						8,00	jenis	2,00	jenis	5,00	jenis	26,00	jenis	520,00			
				Pemantauan kualitas media lingkungan dan sumber pencemaran	Jumlah sungai dan laut yang didata kualitas air serta sumber pencemarnya sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya	0,00	media lingkungan	0,00	media lingkungan	6,00	media lingkungan	0,00	media lingkungan	0,00			
							sungai		sungai	10,00	sungai	6,00	sungai	60,00			
						0,00	sumber pencemar	0,00	sumber pencemar	10,00	sumber pencemar	3,00	sumber pencemar	30,00			
				<b>Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>	<b>360,00</b>	<b>%</b>	<b>290,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75,00</b>			
				GEPUK (Gerakan Penyuluhan Lingkungan)	Dukungan untuk penyuluhan desa desa eko edu wisata di Kab. Kampar dan Solok; Dukungan untuk penyuluh multi sektor yang ditingkatkan wawasan lingkungannya dan diberdayakan dalam penyebarluasan informasi lingkungan hidup		Laporan		Laporan	1,00	Laporan	1	Laporan	100,00			
						150,00	orang	50,00	orang	50,00	orang	-	orang	0,00			
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	jumlah peserta bimtek tim adiwiyata;	0,00	2) orang	80,00	2) orang	85,00	2) orang	85	2) orang	100,00			
				Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	8,00	even	4,00	even	0,00	even	0	even				



				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Jumlah Kab/Kota yang kelompok masyarakatnya berperanserta dalam pengelolaan sampah		Kab/kota		Kab/kota	7,00	Kab/kota	7,00	Kab/kota	100,00			
						6,00	kegiatan/kelompok	9,00	kegiatan/kelompok	2,00	kegiatan/kelompok	3,00	kegiatan/kelompok	150,00			
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	dukungan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPSP		laporan		laporan	1,00	laporan	1,00	laporan	100,00			
						88,00	kab/kota	47,00	kab/kota	9,00	kab/kota	0,00	kab/kota	0,00			
				Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota	Jumlah kab/kota yang dibina dalam melakukan pengelolaan sampah; Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan sampah Provinsi Sumatera Barat yang disusun		dokumen		dokumen	1,00	dokumen	0,00	dokumen	0,00			
						76,00	kab/kota;	64,00	kab/kota;	5,00	kab/kota;	10,00	kab/kota;	200,00			
						0,00	orang	40,00	orang	10,00	orang	0,00	orang	0,00			
				<b>Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan TPA Regiona</b>	302,00	%	245,25	%	76,00	%	90,00	%	118,42			
					<b>Jumlah TPA regional yang didanai</b>	15,00	unit	14,00	unit	4,00	unit	8,00	unit	200,00			
					<b>Peningkatan infrastruktur TPA regional</b>	400,00	unit	322,50	unit	110,00	unit	0,00	unit	0,00			
				Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	16,00	laporan RKL/RPL	10,00	laporan RKL/RPL	2,00	laporan RKL/RPL	8,00	laporan RKL/RPL	400,00			
				Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional	Terlaksananya operasional TPA	2,00	TPA	2,50	TPA	2,00	TPA	8,00	TPA	400,00			

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2020/2021 dianggap berhasil meskipun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya terlambat oleh faktor teknis diluar kontrol perencanaan, namun dengan upaya, strategi dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas LH Provinsi Sumatera Barat kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya.

Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya/rendahnya target adalah karena:

1. Kondisi pandemi COVID19 yang mengakibatkan terjadinya beberapa kali rasionalisasi dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic dimaksud. Selain itu kondisi pandemi yang mengharuskan dijalankannya protokol kesehatan juga merubah sebagian pola dan cara kerja dalam pencapaian sasaran/target kegiatan.
2. Perubahan indikator kinerja kegiatan.
3. Tertundanya atau menumpuknya pekerjaan di triwulan akhir tahun anggaran.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Adapun kewenangan yang menyertainya adalah menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan guna membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, dengan fungsi yang melekat yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan lingkungan hidup berdasarkan Pergub Nomor 78 Tahun 2016 memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKU (Indikator Kinerja Utama). Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari IKU Tahun 2020 berdasarkan cascading yang telah ditetapkan. Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran 1			
Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	90%	93,61%	104,01%
Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	85%	85%	100%
Sasaran 2			
Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	2%	2,527%	126,35
Sasaran 3			
Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	8.2%	8.8%	107,3%
Sasaran 4			
Meningkatnya kapasitas dan peranserta <i>stakeholders</i>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase peningkatan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	59	43	72,88%
Sasaran 5			
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Nilai Evaluasi AKIP OPD	B	BB	106
% Capaian rata-rata			

Dari tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 6 indikator kinerja yang mengukur keberhasilan 5 sasaran strategis (SS) tahun 2020 adalah **101,75%**. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 101,75% tersebut termasuk dalam klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik atau dengan kata lain tidak ada indikator kinerja yang tergolong gagal (tingkat capaian >93%).

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan permasalahan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkungan hidup yang dihadapi Prov. Sumbar maka dirumuskan isu strategis lingkup pelayanan Prov. Sumbar sebagai berikut :

1. Fluktuasi debit sungai dan pencemaran air. Isu ini antara lain dilatarbelakangi oleh meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi (misalnya industri sawit), meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pemukiman, meningkatnya luas lahan, meningkatnya produktivitas perikanan darat dan peternakan aktifitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai, kurangnya komitmen pemda dalam pengawasan dan kebijakan tata ruang yang buruk.
2. Persampahan. Isu ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang), kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri, budaya malas, isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah, berkembangnya program pengembangan pariwisata, kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pengelolaan sampah dan tidak adanya penegakan hukum.
3. Alih fungsi lahan dan penurunan tutupan hutan. Isu ini berkembang akibat dari beberapa faktor, antara lain pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak merata, peningkatan jumlah kebutuhan perumahan, pembukaan lahan baru dari masyarakat untuk perkebunan, investasi ekstraktif, politik ekonomi tidak pro konservasi, industrialisasi skala besar dan kebijakan pemerintah yang mendukung, misal kebijakan pembangunan 1 juta rumah bersubsidi.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sampai dengan disusunnya rancangan awal Renja ini, rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat TA 2022 belum ada. Oleh sebab itu maka review terhadap rancangan awal RKPD belum dapat dilakukan. Review hanya dapat dilakukan terhadap indikator kinerja sasaran pada misi terkait pada rancangan teknokratik RPJMD 2021 – 2026.

Terdapat 4 indikator sasaran kinerja pada misi 5 (mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan) yang menjadi tanggung jawab Dinas LH dalam mengupayakan pencapaian targetnya, yaitu:

Indikator	Satuan	Target 2021	Target 2026
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	77,08	77,12
Persentase Pengurangan Sampah	%	24	30
Persentase Penanganan Sampah	%	74	70
Persentase Pengolahan Limbah B3 Medis	%	75	80

Memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 sebagaimana tabel di atas, jika disandingkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target dari masing-masing indikator kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada di dalam rancangan awal Renja ini telah sesuai dan dapat diandalkan. Hanya saja diperlukan beberapa

penyesuaian pada angka target di dalam dokumen rancangan teknokratik tersebut, yang nantinya akan diwujudkan di dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026, dimana untuk IKLH angka realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sudah melebihi daripada angka target pada tahun 2026 yang tercantum pada tabel di atas.

Tabel 2.5  
Review terhadap konsep rancangan awal rkpd tahun 2022  
Provinsi Sumatera Barat

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (sesuai Renstra)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>53.608.250.000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>39.508.250.000</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					<b>14.429.250.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					<b>14.429.250.000</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>140.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>140.000.000</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	9 dokumen	80.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	9 dokumen	80.000.000		
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	dokumen evaluasi kinerja triwulanan Terlaksananya evaluasi kinerja DLH	4 dokumen 6 program/kegiatan	60.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	dokumen evaluasi kinerja triwulanan Terlaksananya evaluasi kinerja DLH	4 dokumen 6 program/kegiatan	60.000.000		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>10.413.000.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>10.413.000.000</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang	Gaji dan Tunjangan ASN DLH yang dibayarkan dalam 1 tahun	89 pegawai	9.763.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang	Gaji dan Tunjangan ASN DLH yang dibayarkan dalam 1 tahun	89 pegawai	9.763.000.000		
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang	Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi, petugas PPHPK)	12 bulan	650.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang	Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi, petugas PPHPK)	12 bulan	650.000.000		
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>110.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>110.000.000</b>
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	2 unit bangunan; 1 unit roda dua; 10 unit roda empat	110.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	2 unit bangunan; 1 unit roda dua; 10 unit roda empat	110.000.000		
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>202.250.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>202.250.000</b>
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	91 stel	77.250.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	91 stel	77.250.000		

4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang	ASN DLH yang mengikuti Bimtek	5 orang	125.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang	ASN DLH yang mengikuti Bimtek	5 orang	125.000.000
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.124.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.124.000.000</b>
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 bulan	25.000.000
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Tersedianya Komputer dan Jaringan Komputerisasi Tersedianya Peralatan Studio komunikasi dan informasi	12 bulan 4 jenis 8 unit	299.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Tersedianya Komputer dan Jaringan Komputerisasi Tersedianya Peralatan Studio komunikasi dan informasi	12 bulan 4 jenis 8 unit	299.000.000
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang	Bahan logistik kantor (ATK dan makan/minum pertemuan dan tamu) yang disediakan	12 bulan	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang	Bahan logistik kantor (ATK dan makan/minum pertemuan dan tamu) yang disediakan	12 bulan	150.000.000
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	50.000.000
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang	Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 bulan	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang	Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 bulan	50.000.000
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan	550.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan	550.000.000
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.050.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.050.000.000</b>
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang	Jumlah surat yang didistribusikan	20 kali	50.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang	Jumlah surat yang didistribusikan	20 kali	50.000.000
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang	Rekening tagihan air; internet; listrik; telpon yang di bayarkan	500Å meter kubik; 150 mbps; 82000 kwh; 2 rekening	500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang	Rekening tagihan air; internet; listrik; telpon yang di bayarkan	500Å meter kubik; 150 mbps; 82000 kwh; 2 rekening	500.000.000
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang	Jasa Kesehatan Jasmani (senam mingguan); Jasa Kesehatan Rohani (wirid mingguan, program Ramadhan); Jasa Rohaniwan; Dukungan penerapan new normal Terpenuhinya jasa kebersihan kantor , sopir kantor, pengamanan kantor dan Honor PTT	12 bulan	1.500.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang	Jasa Kesehatan Jasmani (senam mingguan); Jasa Kesehatan Rohani (wirid mingguan, program Ramadhan); Jasa Rohaniwan; Dukungan penerapan new normal Terpenuhinya jasa kebersihan kantor , sopir kantor, pengamanan kantor dan Honor PTT	12 bulan	1.500.000.000
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>390.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>390.000.000</b>

7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang	Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	1 unit roda dua; 9 unit roda empat	110.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang	Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	1 unit roda dua; 9 unit roda empat	110.000.000
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Gedung Kantor yang Dipelihara Gedung kantor yang direhab	1 bangunan 1 paket	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Gedung Kantor yang Dipelihara Gedung kantor yang direhab	1 bangunan 1 paket	200.000.000
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Instalasi dan Jaringan yang Dipelihara Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan 12 bulan 12 bulan	80.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Instalasi dan Jaringan yang Dipelihara Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan 12 bulan 12 bulan	80.000.000
ii	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>
1	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>		<b>Persentase pemanfaatan dokumen RPPLH dalam penyusunan KLHS</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>		<b>Persentase pemanfaatan dokumen RPPLH dalam penyusunan KLHS</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>
1.1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dalam rangka penyusunan dokumen RPPLH yang mempedomani RPPLH Provinsi	-	150.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dalam rangka penyusunan dokumen RPPLH yang mempedomani RPPLH Provinsi	-	150.000.000
2	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>		<b>Persentase integrasi dokumen KLHS dalam dokumen perencanaan lainnya</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>		<b>Persentase integrasi dokumen KLHS dalam dokumen perencanaan lainnya</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>
1.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW, RDTR, KSP Kab/Kota	-	150.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW, RDTR, KSP Kab/Kota	-	150.000.000
iii	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan</b>	<b>60%</b>	<b>4.727.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan</b>	<b>60%</b>	<b>4.727.000.000</b>
1	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persentase objek yang dapat dicegah pencemaran dan/atau perusakannya terhadap lingkungan hidup</b>	<b>40%</b>	<b>4.727.000.000</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persentase objek yang dapat dicegah pencemaran dan/atau perusakannya terhadap lingkungan hidup</b>	<b>40%</b>	<b>4.727.000.000</b>
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	19 Kab/Kota	Jumlah media lingkungan yang dipantau	3 media lingkungan	658.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	19 Kab/Kota	Jumlah media lingkungan yang dipantau	3 media lingkungan	658.000.000

1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kab. Dharmasraya,	Tersedianya laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 laporan	175.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kab. Dharmasraya,	Tersedianya laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 laporan	175.000.000
1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		jumlah dokumen DED pemulihan LAT yang disusun (Sijunjung)	1 dokumen	894.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		jumlah dokumen DED pemulihan LAT yang disusun (Sijunjung)	1 dokumen	894.000.000
			jumlah dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Barat (Draft)	1 dokumen				jumlah dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Barat (Draft)	1 dokumen	
1.4	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Kota Padang (UPTD Laboratorium)	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	2 Kegiatan	3.000.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Kota Padang (UPTD Laboratorium)	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	2 Kegiatan	3.000.000.000
			Jumlah parameter yang akan diajukan untuk akreditasi dan registrasi	8 Parameter				Jumlah parameter yang akan diajukan untuk akreditasi dan registrasi	8 Parameter	
			Jumlah pengadaan peralatan, supporting laboratorium dan bahan kimia yang disediakan	23 Jenis				Jumlah pengadaan peralatan, supporting laboratorium dan bahan kimia yang disediakan	23 Jenis	
			Jumlah UPTD Laboratorium yang dioperasikan	1 Labor				Jumlah UPTD Laboratorium yang dioperasikan	1 Labor	
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		<b>Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya</b>	<b>19 Kab/Kota</b>	<b>835.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		<b>Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya</b>	<b>19 Kab/Kota</b>	<b>835.000.000</b>
1	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>		<b>Persentase keanekaragaman hayati provinsi yang terkelola</b>	<b>100%</b>	<b>835.000.000</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>		<b>Persentase keanekaragaman hayati provinsi yang terkelola</b>	<b>100%</b>	<b>835.000.000</b>
1.1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 dokumen	150.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 dokumen	150.000.000
1.2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah kawasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola	1 kawasan	125.000.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Padang Pariaman,	Jumlah kawasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola	1 kawasan	125.000.000
1.3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Jumlah kab./kota yang dibina dalam rangka pengelolaan ruang terbuka hijau	19 kabupaten/kota	150.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Jumlah kab./kota yang dibina dalam rangka pengelolaan ruang terbuka hijau	19 kabupaten/kota	150.000.000
1.4	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		Jumlah kawasan taman kehati lainnya yang dikelola	1 kawasan	150.000.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		Jumlah kawasan taman kehati lainnya yang dikelola	1 kawasan	150.000.000

1.5	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Agam, Kab. Solok,	Jumlah kelompok/lembaga pengelola kehati yang dibina	4 kelompok/lembaga	110.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Agam, Kab. Solok,	Jumlah kelompok/lembaga pengelola kehati yang dibina	4 kelompok/lembaga	110.000.000
1.6	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati		Jumlah paket pengadaan pengelolaan sarana dan prasarana kehati	2 paket	150.000.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati		Jumlah paket pengadaan pengelolaan sarana dan prasarana kehati	2 paket	150.000.000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		<b>Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi</b>	<b>50%</b>	<b>442.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		<b>Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi</b>	<b>50%</b>	<b>392.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi yang dapat dibina dan diawasi</b>	<b>70%</b>	<b>442.000.000</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi yang dapat dibina dan diawasi</b>	<b>70%</b>	<b>392.000.000</b>
1.2	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kota Padang, Kab. Solok Selatan,	Jumlah kab/kota yang difasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	10 Kab/Kota	150.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kota Padang, Kab. Solok Selatan,	Jumlah kab/kota yang difasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	10 Kab/Kota	100.000.000
1.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kota Padang, Kab. Pasaman Barat, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan,	Jumlah instansi lingkungan hidup yang dilakukan pelatihan di bidang perizinan lingkungan, pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan)		120.000.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kota Padang, Kab. Pasaman Barat, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan,	Jumlah instansi lingkungan hidup yang dilakukan pelatihan di bidang perizinan lingkungan, pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan)		120.000.000
			Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10 objek				Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10 objek	
1.4	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		Sertifikat Kompetensi PLH	2 Sertifikat	65.000.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		Sertifikat Kompetensi PLH	2 Sertifikat	65.000.000
1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan evaluasi penerapan sanksi	7 sanksi	107.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan evaluasi penerapan sanksi	7 sanksi	107.000.000
			Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup	3 sanksi				Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup	3 sanksi	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>		<b>Persentase penanganan LB3 Sumatera Barat</b>	<b>100%</b>	<b>16.200.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>		<b>Persentase penanganan LB3 Sumatera Barat</b>	<b>100%</b>	<b>4.200.000.000</b>



1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase timbulan LB3 Sumatera barat yang terkumpul	100%	16.200.000.000	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase timbulan LB3 Sumatera barat yang terkumpul	100%	4.200.000.000
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3	1 kali	200.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3	1 kali	200.000.000
		Jumlah kab/kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	19 kab/kota			Jumlah kab/kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	19 kab/kota	
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	1 lokasi	16.000.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	1 lokasi	4.000.000.000
VII	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	100.000.000	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	100.000.000
1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase kabupaten/kota yang telah melakukan inventarisasi data pengakuan keberadaan MHA, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH	15%	100.000.000	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase kabupaten/kota yang telah melakukan inventarisasi data pengakuan keberadaan MHA, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH	15%	100.000.000
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok yang di fasilitasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai MHA	1 orang/kelompok	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok yang di fasilitasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai MHA	1 orang/kelompok	100.000.000
VIII	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	75%	2.830.000.000	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	75%	2.830.000.000
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah diinventarisir/diidentifikasi untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan	10 lembaga	2.830.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah diinventarisir/diidentifikasi untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan	10 lembaga	2.830.000.000

			<b>penyuluhan lingkungan hidup</b>					<b>penyuluhan lingkungan hidup</b>		
1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah anggota saka kalpataru	100 orang	2.830.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah anggota saka kalpataru	100 orang	2.830.000.000
			Jumlah kab/kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R bagi kelompok masyarakat	2 Kab/Kota				Jumlah kab/kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R bagi kelompok masyarakat	2 Kab/Kota	
			Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup	25 kali				Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup	25 kali	
			Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan	90 orang				Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan	90 orang	
			Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	2 event				Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	2 event	
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		<b>Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup</b>	<b>10%</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		<b>Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup</b>	<b>10%</b>	<b>1.350.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah masyarakat yang diberikan penghargaan lingkungan tingkat provinsi</b>	<b>5 orang/lembaga</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah masyarakat yang diberikan penghargaan lingkungan tingkat provinsi</b>	<b>5 orang/lembaga</b>	<b>1.350.000.000</b>
1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Kota Sawahlunto,	Jumlah calon yang diverifikasi dan diusulkan sebagai penerima Kalpataru	8 org/kelompok	1.400.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Kota Sawahlunto,	Jumlah calon yang diverifikasi dan diusulkan sebagai penerima Kalpataru	8 org/kelompok	1.350.000.000
			Jumlah dokumen IKPLHD yang di susun	1 dokumen				Jumlah dokumen IKPLHD yang di susun	1 dokumen	
			Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dinilai	15 Kab/Kota				Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dinilai	15 Kab/Kota	
			Jumlah Kec/kelurahan yang dibina dan dinilai	26 Kec/Kel				Jumlah Kec/kelurahan yang dibina dan dinilai	26 Kec/Kel	
			Jumlah Sekolah yang dibina dan dinilai	100 sekolah				Jumlah Sekolah yang dibina dan dinilai	100 sekolah	
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan</b>	<b>90%</b>	<b>230.000.000</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan</b>	<b>90%</b>	<b>230.000.000</b>

1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani sesuai SOP	100%	230.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani sesuai SOP	100%	230.000.000
1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	19 Kab/Kota	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	3 kasus	230.000.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	19 Kab/Kota	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	3 kasus	230000000
			Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya	15 kasus				Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya	15 kasus	
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	60%	12.115.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	60%	12.115.000.000
1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional	100%	12.115.000.000	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional	100%	12.115.000.000
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		Jumlah kebijakan/ peraturan daerah yang disusun	1 PERDA	315.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		Jumlah kebijakan/ peraturan daerah yang disusun	1 PERDA	315.000.000
			Jumlah dokumen Master Plan Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 dokumen	800.000.000			Jumlah dokumen Master Plan Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 dokumen	800.000.000
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus		Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan sampah	19 kab/kota	400.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus		Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan sampah	19 kab/kota	400.000.000
			Jumlah kab/kota yang mengikuti program sektor sampah	19 kab/kota				Jumlah kab/kota yang mengikuti program sektor sampah	19 kab/kota	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Bank Sampah yang dibangun	2 Paket				Jumlah Sarana dan Prasarana Bank Sampah yang dibangun	2 Paket	
			Jumlah sarana dan prasarana yang dibantu bagi pemukiman/keompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah	5 paket				Jumlah sarana dan prasarana yang dibantu bagi pemukiman/keompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah	5 paket	
1.3	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah TPA Sampah Regional yang dioperasikan	2 TPA	5.250.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah TPA Sampah Regional yang dioperasikan	2 TPA	5.250.000.000
			Jumlah TPA Sampah Regional yang dipelihara infrastrukturnya					Jumlah TPA Sampah Regional yang dipelihara infrastrukturnya		

1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Regional yang dipantau	4 Laporan RKL-RPL	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Regional yang dipantau	4 Laporan RKL-RPL	150.000.000	
1.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah alat berat untuk penanganan sampah di TPA Sampah Regional yang diadakan	2 paket	5.200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah alat berat untuk penanganan sampah di TPA Sampah Regional yang diadakan	2 paket	5.200.000.000	
			Jumlah prasarana dan sarana pengolahan sampah yang diadakan	2 paket				Jumlah prasarana dan sarana pengolahan sampah yang diadakan	2 paket		

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 secara umum telah mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kab/Kota, hal ini dimungkinkan karena disamping isu lingkungan di setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat hampir identik, pada akhir tahun yang lalu juga telah dilakukan konsultasi publik dalam rangka penyusunan KLHS RPJMD 2021-2026 untuk menjangkau masukan dari masyarakat dan stakeholder. Usulan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota, yang selanjutnya akan direkapitulasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan yang akan dibahas pada Rapat Koordinasi Program/Kegiatan tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021.

## Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Terdapat 7 Agenda Pembangunan yang termuat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari ketujuh agenda pembangunan nasional tersebut di atas, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi-misi Presiden, maka pembangunan daerah bidang lingkungan hidup sangat terkait erat dengan agenda pembangunan nasional keenam, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan lingkungan hidup di daerah, yang mana untuk tahun 2022 dituangkan perencanaannya di dalam dokumen renja ini, adalah dimaksudkan untuk berkontribusi mencapai prioritas nasional ini.

Lebih lanjut dapat dijabarkan bahwa Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya peningkatan kualitas lingkungan hidup ini ditetapkan sebagai salah satu sasaran di dalam dokumen RPJMN 2020-2024, dengan indikator utama IKU, IKA, IKAL dan IKTL, yang mana tiga dari empat indikator ini juga digunakan di dalam rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2026.

Di dalam rancangan Renja Dinas LH 2022, untuk telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang akan sangat menunjang pencapaian sasaran nasional, maupun sasaran strategis daerah, meliputi:

- a. Program perencanaan lingkungan hidup;
- b. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);

- d. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh);
- e. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- f. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- g. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- h. Program pengelolaan persampahan

Selain melalui 8 (delapan) program strategis di atas, OPD Lingkungan Hidup dalam pencapaian sasaran tersebut di atas juga didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara teknis selain dukungan bagi pencapaian sasaran pokok arah kebijakan pembangunan pada RPJM ke 4 dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan sektor dan urusan lingkungan hidup Tahun 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup bertujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lingkungan yang tertata.
2. Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak.
3. Terwujudnya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam.
4. Terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2022-2026 serta RPJMD Sumatera Barat 2021-2026. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2021-2026 seperti pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran pada tahun 2022
1.	Meningkatnya kualitas air dan udara	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	1. Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	77%
2. Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan			75%	
2.		Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	7%
3.		Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	11%
4.		Meningkatnya kapasitas dan	Jumlah orang/kelompok yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	136 orang/kelompok

		peranserta <i>stakeholders</i>		
5.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi AKIP OPD	BB

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan strategi yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program.

Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat direncanakan menjalankan 11 Program dan kegiatan yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Uraian rencana Program dan Kegiatan beserta indikatornya pada Tahun 2020 dapat terlihat pada tabel 3.3 (terlampir).



Tabel 3.3  
Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2022 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WAJIB								
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>39.508.250.000</b>				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>14.429.250.000</b>				<b>14.938.000.000</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>140.000.000</b>				<b>160.000.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	Kota Padang	9 dokumen	80.000.000			9 dokumen	90.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen evaluasi kinerja triwulanan Terlaksananya evaluasi kinerja DLH	Kota Padang	4 dokumen 6 program/kegiatan	60.000.000			4 dokumen 6 program/kegiatan	70.000.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>10.413.000.000</b>				<b>10.560.000.000</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN DLH yang dibayarkan dalam 1 tahun	Kota Padang	89 pegawai	9.763.000.000			89 pegawai	9.900.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi, petugas PPHPK)	Kota Padang	12 bulan	650.000.000			12 bulan	660.000.000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>110.000.000</b>				<b>120.000.000</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kota Padang	2 unit bangunan; 1 unit roda dua; 10 unit roda empat	110.000.000			2 unit bangunan; 1 unit roda dua; 10 unit roda empat	120.000.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>202.250.000</b>				<b>223.000.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Padang	91 stel	77.250.000			91 stel	88.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN DLH yang mengikuti Bimtek	Kota Padang	5 orang	125.000.000			5 orang	135.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.124.000.000</b>				<b>1.185.000.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Padang	12 bulan	25.000.000			12 bulan	35.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Tersedianya Komputer dan Jaringan Komputerisasi Tersedianya Peralatan Studio komunikasi dan informasi	Kota Padang	12 bulan 4 jenis 8 unit	299.000.000		12 bulan 4 jenis 8 unit	310.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor (ATK dan makan/minum pertemuan dan tamu) yang disediakan	Kota Padang	12 bulan	150.000.000		12 bulan	160.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Padang	12 bulan	50.000.000		12 bulan	60.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Padang	12 bulan	50.000.000		12 bulan	60.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		12 bulan	550.000.000		12 bulan	560.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.050.000.000</b>			<b>2.260.000.000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	Kota Padang	20 kali	50.000.000		20 kali	60.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening tagihan air; internet; listrik; telpon yang di bayarkan	Kota Padang	500Å meter kubik; 150 mbps; 82000 kwh; 2 rekening	500.000.000		500Å meter kubik; 150 mbps; 82000 kwh; 2 rekening	600.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kesehatan Jasmani (senam mingguan); Jasa Kesehatan Rohani (wirid mingguan, program Ramadhan); Jasa Rohaniwan; Dukungan penerapan new normal Terpenuhinya jasa kebersihan kantor , sopir kantor, pengamanan kantor dan Honor PTT	Kota Padang	12 bulan	1.500.000.000		12 bulan	1.600.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>390.000.000</b>			<b>430.000.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	Kota Padang	1 unit roda dua; 9 unit roda empat	110.000.000		1 unit roda dua; 9 unit roda empat	120.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang Dipelihara Gedung kantor yang direhab	Kota Padang	1 bangunan 1 paket	200.000.000		1 bangunan 1 paket	220.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Instalasi dan Jaringan yang Dipelihara Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Perlengkapan kantor yang dipelihara	Kota Padang	12 bulan 12 bulan 12 bulan	80.000.000		12 bulan 12 bulan 12 bulan	90.000.000
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi</b>				<b>100%</b>		<b>320.000.000</b>
<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>	<b>Persentase pemanfaatan dokumen RPPLH dalam penyusunan KLHS</b>				<b>100%</b>		<b>160.000.000</b>
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dalam rangka penyusunan dokumen RPPLH yang mempedomani RPPLH Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.000.000			160.000.000

<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>	<b>Persentase integrasi dokumen KLHS dalam dokumen perencanaan lainnya</b>			<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>160.000.000</b>
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW, RDTR, KSP Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-		150.000.000			-	160.000.000
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan</b>			<b>60%</b>	<b>4.727.000.000</b>			<b>60%</b>	<b>4.390.000.000</b>
<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase objek yang dapat dicegah pencemaran dan/atau perusakannya terhadap lingkungan hidup</b>			<b>40%</b>	<b>4.727.000.000</b>			<b>40%</b>	<b>4.390.000.000</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah media lingkungan yang dipantau	19 Kab/Kota	3 media lingkungan		658.000.000			3 media lingkungan	700.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersedianya laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kab. Dharmasraya,	1 laporan		175.000.000			1 laporan	190.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	jumlah dokumen DED pemulihan LAT yang disusun (Sijunjung)		1 dokumen		894.000.000			1 dokumen	-
	jumlah dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Barat (Draft)		1 dokumen					1 dokumen	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	Kota Padang (UPTD Laboratorium)	2 Kegiatan		3.000.000.000			2 Kegiatan	3.500.000.000
	Jumlah parameter yang akan diajukan untuk akreditasi dan registrasi		8 Parameter					8 Parameter	
	Jumlah pengadaan peralatan, suporting laboratorium dan bahan kimia yang disediakan		23 Jenis					23 Jenis	
	Jumlah UPTD Laboratorium yang dioperasikan		1 Labor					1 Labor	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya</b>			<b>19 Kab/Kota</b>	<b>835.000.000</b>			<b>19 Kab/Kota</b>	<b>895.000.000</b>
<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>	<b>Persentase keanekaragaman hayati provinsi yang terkelola</b>			<b>100%</b>	<b>835.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>895.000.000</b>
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		1 dokumen		150.000.000			1 dokumen	160.000.000

Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah kawasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola	Kab. Padang Pariaman,	1 kawasan	125.000.000		1 kawasan	135.000.000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah kab./kota yang dibina dalam rangka pengelolaan ruang terbuka hijau		19 kabupaten/kota	150.000.000		19 kabupaten/kota	160.000.000
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah kawasan taman kehati lainnya yang dikelola		1 kawasan	150.000.000		1 kawasan	160.000.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kelompok/lembaga pengelola kehati yang dibina	Kab. Agam, Kab. Solok,	4 kelompok/lembaga	110.000.000		4 kelompok/lembaga	120.000.000
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah paket pengadaan pengelolaan sarana dan prasarana kehati		2 paket	150.000.000		2 paket	160.000.000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi</b>		<b>50%</b>	<b>442.000.000</b>		<b>50%</b>	<b>510.000.000</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi yang dapat dibina dan diawasi</b>		<b>70%</b>	<b>442.000.000</b>		<b>70%</b>	<b>510.000.000</b>
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah kab/kota yang difasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kota Padang, Kab. Solok Selatan,	10 Kab/Kota	150.000.000		10 Kab/Kota	160.000.000
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah instansi lingkungan hidup yang dilakukan pelatihan di bidang perizinan lingkungan, pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan)	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kota Padang, Kab. Pasaman Barat, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan,		120.000.000			135.000.000
	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		10 objek			10 objek	
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Sertifikat Kompetensi PLH		2 Sertifikat	65.000.000		2 Sertifikat	85.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan evaluasi penerapan sanksi		7 sanksi	107.000.000		7 sanksi	130.000.000

	Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup		3 sanksi			3 sanksi	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase penanganan LB3 Sumatera Barat</b>		<b>100%</b>	<b>16.200.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>17.720.000.000</b>
<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase timbulan LB3 Sumatera barat yang terkumpul</b>		<b>100%</b>	<b>16.200.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>17.720.000.000</b>
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3		1 kali	200.000.000		1 kali	220.000.000
	Jumlah kab/kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik		19 kab/kota			19 kab/kota	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah		1 lokasi	4.000.000.000		1 lokasi	17.500.000.000
<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>		<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>110.000.000</b>
<b>Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>Persentase kabupaten/kota yang telah melakukan inventarisasi data pengakuan keberadaan MHA, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH</b>		<b>15%</b>	<b>100.000.000</b>		<b>15%</b>	<b>110.000.000</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok yang difasilitasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai MHA		1 orang/kelompok	100.000.000		1 orang/kelompok	110.000.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>		<b>75%</b>	<b>2.830.000.000</b>		<b>75%</b>	<b>3.000.000.000</b>
<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah diinventarisir/diidentifikasi untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>		<b>10 lembaga</b>	<b>2.830.000.000</b>		<b>10 lembaga</b>	<b>3.000.000.000</b>
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah anggota saka kalpataru		100 orang	2.830.000.000		100 orang	3.000.000.000
	Jumlah kab/kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R bagi kelompok masyarakat		2 Kab/Kota			2 Kab/Kota	
	Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup		25 kali			25 kali	
	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan		90 orang			90 orang	

	Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup		2 event			2 event	
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup</b>		<b>10%</b>	<b>1.400.000.000</b>		<b>10%</b>	<b>1.500.000.000</b>
<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah masyarakat yang diberikan penghargaan lingkungan tingkat provinsi</b>		<b>5 orang/lembaga</b>	<b>1.400.000.000</b>		<b>5 orang/lembaga</b>	<b>1.500.000.000</b>
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah calon yang diverifikasi dan diusulkan sebagai penerima Kalpataru	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Kota Sawahlunto,	8 org/kelompok	1.400.000.000		8 org/kelompok	1.500.000.000
	Jumlah dokumen IKPLHD yang di susun		1 dokumen			1 dokumen	
	Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dinilai		15 Kab/Kota			15 Kab/Kota	
	Jumlah Kec/kelurahan yang dibina dan dinilai		26 Kec/Kel			26 Kec/Kel	
	Jumlah Sekolah yang dibina dan dinilai		100 sekolah			100 sekolah	
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan</b>		<b>90%</b>	<b>230.000.000</b>		<b>90%</b>	<b>240.000.000</b>
<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>	<b>persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani sesuai SOP</b>		<b>100%</b>	<b>230.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>240.000.000</b>
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	19 Kab/Kota	3 kasus	230.000.000		3 kasus	240.000.000
	Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya		15 kasus			15 kasus	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat</b>		<b>60%</b>	<b>12.115.000.000</b>		<b>60%</b>	<b>12.925.000.000</b>
<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional</b>		<b>100%</b>	<b>12.115.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>12.925.000.000</b>
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah kebijakan/ peraturan daerah yang disusun		1 PERDA	315.000.000		1 PERDA	350.000.000
	Jumlah dokumen Master Plan Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Barat yang disusun		1 dokumen	800.000.000		1 dokumen	900.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan sampah		19 kab/kota	400.000.000		19 kab/kota	500.000.000
	Jumlah kab/kota yang mengikuti program sektor sampah		19 kab/kota			19 kab/kota	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Bank Sampah yang dibangun		2 Paket			2 Paket	

		Jumlah sarana dan prasarana yang dibantu bagi pemukiman/kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah		5 paket			5 paket	
Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah TPA Sampah Regional yang dioperasikan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 TPA	5.250.000.000			2 TPA	5.500.000.000
	Jumlah TPA Sampah Regional yang dipelihara infrastrukturnya							
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Regional yang dipantau	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan RKL-RPL	150.000.000			4 Laporan RKL-RPL	175.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah alat berat untuk penanganan sampah di TPA Sampah Regional yang diadakan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 paket	5.200.000.000			2 paket	5.500.000.000
	Jumlah prasarana dan sarana pengolahan sampah yang diadakan		2 paket				2 paket	

## IV PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 - 2026 dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025.

RENJA OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana kegiatan pada bidang-bidang dan sekretariat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan lingkungan hidup 2022 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku serta mempedomani arahan perencanaan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan RENJA OPD ini sesuai dengan yang termuat di dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat.
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menjamin konsistensi antara rancangan RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 – 2026 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 – 2026.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENJA OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk melakukan pemantauan pelaksanaannya.



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
2	11				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					39,208,250,000				43,537,250,000		
2	11	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					14,429,250,000				16,125,250,000		
2	11	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					140,000,000				173,000,000		
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 dokumen		80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			98,000,000
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen evaluasi kinerja triwulanan Dukumen Evaluasi Perangkat Daerah ( LAKIP, LPPD, LKPJ) Terlaksananya evaluasi kinerja DLH		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 dokumen 3 dokumen 6 program/kegiatan		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000
2	11	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					10,413,000,000				11,750,000,000		
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN DLH yang dibayarkan dalam 1 tahun		Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		89 orang		9,763,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,000,000,000
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	asa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi		Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		12 bulan		650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			750,000,000
2	11	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					110,000,000				110,000,000		
2	11	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara		Kota Padang, Padang Utara, Semua Kelurahan		1 unit roda dua 10 unit roda empat		110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000
2	11	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					202,250,000				202,250,000		
2	11	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya		Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		103 stel		77,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77,250,000
2	11	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN DLH yang mengikuti Bimtek		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 orang		125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,000,000
2	11	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					1,124,000,000				1,320,000,000		
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		12 bulan		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Tersedianya Komputer dan Jaringan Komputerisasi Tersedianya Peralatan Studio komunikasi dan informasi		Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		12 bulan 4 jenis 8 unit		299,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat tulis kantor yang disediakan Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu		Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		12 bulan 12 bulan		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				175,000,000
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		12 bulan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undanganyang disediakan		Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		4 jenis		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				650,000,000
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>2,050,000,000</b>					<b>2,160,000,000</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat yang didistribusikan		Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		20 kali		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening tagihan air yang di bayarkan Rekening tagihan internet yang di bayarkan Rekening tagihan listrik yang di bayarkan Rekening tagihan telpon yang di bayarkan		Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		50 meter kubik 150 mbps 82000 kwh 2 rekening		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Kesehatan Jasmani (senam mingguan); Jasa Kesehatan Rohani (wirid mingguan, program Ramadhan); Jasa Rohaniwan; Dukungan penerapan new normal Terpenuhinya jasa kebersihan kantor, sopir kantor, pengamanan kantor dan Honor PTT		Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		12 bulan 12 bulan		1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,600,000,000
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>390,000,000</b>					<b>410,000,000</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara		Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		1 unit roda dua 10 unit roda empat		110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110,000,000
2.11.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor yang Dipelihara Gedung kantor yang direhab		Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		1 unit 1 paket		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				210,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.11.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Instalasi dan Jaringan yang Dipelihara Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Perlengkapan kantor yang dipelihara		Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		12 bulan 12 bulan 12 bulan		80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,000,000
2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							300,000,000						450,000,000
2.11.02.1.01	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>							150,000,000						250,000,000
2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi		Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dalam rangka penyusunan dokumen RPPLH yang mempedomani RPPLH Provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kab/Kota		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
2.11.02.1.02	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>							150,000,000						200,000,000
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW, RDTR, KSP Kab/Kota		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 Kab/Kota		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							1,727,000,000						1,603,500,000
2.11.03.1.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>							833,000,000						963,500,000
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		jumlah media lingkungan yang dipantau		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 media lingkungan		658,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				771,000,000
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				192,500,000
2.11.03.1.03	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>							894,000,000						640,000,000
2.11.03.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		jumlah dokumen DED pemulihan LAT yang disusun (Sijunjung) jumlah dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Barat (Draft)		Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 dokumen		894,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				640,000,000
2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>							835,000,000						918,500,000
2.11.04.1.01	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>							835,000,000						918,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				165,000,000
2.11.04.1.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Jumlah kawasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kawasan		125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				137,500,000
2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Jumlah kab./kota yang dibina dalam rangka pengelolaan ruang terbuka hijau		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 kabupaten/kota		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				165,000,000
2.11.04.1.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		Jumlah kawasan taman kehati lainnya yang dikelola		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kawasan		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				165,000,000
2.11.04.1.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah kelompok/lembaga pemeliharaan kawasan yang dibina		Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kelompok/lembaga		110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				121,000,000
2.11.04.1.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Jumlah paket pengadaan pengelolaan sarana dan prasarana kehati		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 paket		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				165,000,000
<b>2.11.05</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>						<b>16,200,000,000</b>					<b>17,820,000,000</b>
<b>2.11.05.1.01</b>			<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						<b>16,200,000,000</b>					<b>17,820,000,000</b>
2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 Jumlah Kab/Kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali 19 Kab/kota		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				220,000,000
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 lokasi		16,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17,600,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>					<b>442,000,000</b>				<b>535,000,000</b>			
2	11	06	1.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>					<b>442,000,000</b>				<b>535,000,000</b>			
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah kab/kota yang difasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 kab/kota		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			175,000,000
2	11	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		Sertifikat Kompetensi PLH		Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Sertifikat		65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,000,000
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah instansi lingkungan hidup yang dilakukan pelatihan di bidang perizinan lingkungan, pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan) Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman, Semua		3 Instansi LH 10 objek		120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000

Unit Organisasi : 2.11.0.00.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP					Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022					Rencana Tahun 2022		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	06	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan evaluasi penerapan sanksi Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 sanksi 3 sanksi	107,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000					



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.11.07.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah kelompok yang di fasilitasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai MHA		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 org/kelompok		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000	
<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			<b>2,830,000,000</b>					<b>3,050,000,000</b>					
<b>2.11.08.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>2,830,000,000</b>					<b>3,050,000,000</b>					
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah anggota saka kalpataru Jumlah bank sampah yang dibangun Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup Jumlah sarana dan prasarana yang dibantu bagi permukiman/kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 org 2 paket 75 kelompok 25 kali 90 org 2 event 5 paket		2,830,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,050,000,000	
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			<b>1,400,000,000</b>					<b>1,750,000,000</b>					
<b>2.11.09.1.01</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>1,400,000,000</b>					<b>1,750,000,000</b>					
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah calon yang diverifikasi dan diusulkan sebagai penerima Kalpataru Jumlah dokumen IKPLHD yang di susun Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dinilai Jumlah Kec/kelurahan yang dibina dan dinilai Jumlah Sekolah yang dibina dan dinilai		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 org/kelompok 1 Dokumen 15 Kab/Kota 26 Kec/Kelurahan 100 Sekolah		1,400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,750,000,000	
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>230,000,000</b>					<b>270,000,000</b>					
<b>2.11.10.1.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>			<b>230,000,000</b>					<b>270,000,000</b>					
2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi		Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kasus 15 kasus		230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			270,000,000	
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>			<b>715,000,000</b>					<b>815,000,000</b>					
<b>2.11.11.1.01</b>	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>			<b>715,000,000</b>					<b>815,000,000</b>					



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 11 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		Jumlah kebijakan/ peraturan daerah yang disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 PERDA		315,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				315,000,000
2 11 11 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus		Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan sampah Jumlah kab/kota yang mengikuti program sektor sampah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 kab/kota 19 kab/kota		400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>39,208,250,000</b>				<b>43,537,250,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD Persampahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		Jumlah dokumen Master Plan Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Barat yang disusun		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional		Jumlah TPA Sampah Regional yang dioperasikan Jumlah TPA Sampah Regional yang dipelihara infrastrukturnya		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 TPA 2 TPA		5,250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000,000
2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional yang dipantau		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 laporan RKL RPL		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2.11.11.1.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Jumlah alat berat untuk penanganan sampah di TPA Sampah Regional yang diadakan Jumlah prasarana dan sarana pengolahan sampah yang diadakan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 paket 2 paket		5,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,000,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>11,400,000,000</b>					<b>8,200,000,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Lingkungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	11	03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>								<b>3,300,000,000</b>			
2	11	03	1.01		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>								<b>3,300,000,000</b>			
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan Jumlah parameter yang akan diajukan untuk akreditasi dan registrasi Jumlah pengadaan peralatan, suporting laboratorium dan bahan kimia yang disediakan Jumlah unit laboratorium yang dioperasikan		Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti		2 Kegiatan 8 Parameter 23 Jenis 1 Unit		3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,300,000,000
<b>TOTAL</b>											<b>3,000,000,000</b>			<b>3,300,000,000</b>		